

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, termasuk di Kota Batam. Sebagai kota industri dan perdagangan yang berkembang pesat, Batam tetap menghadapi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi (Marcelinus Molo, 1995). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Batam secara umum, terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu seperti 2014, 2018, dan 2021, yang dipicu oleh melemahnya kondisi perekonomian kota. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan syarat tertentu, seperti kehadiran anak (1995) di sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin.

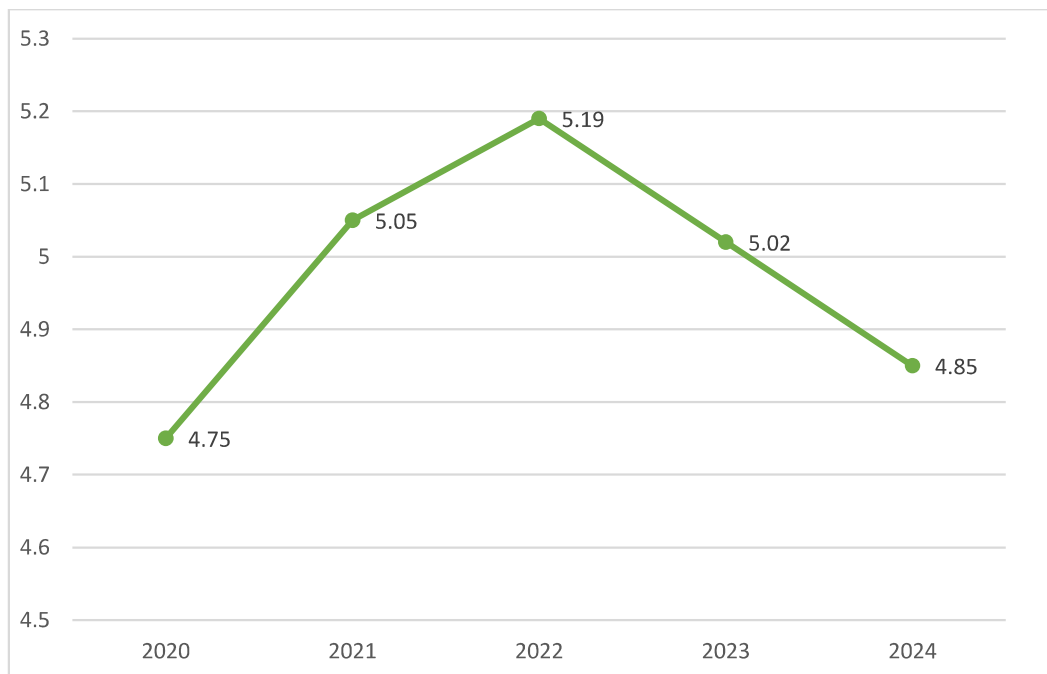
Ketidak berdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dapat diartikan kemiskinan adalah suatu permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, semua provinsi, dan semua daerah dalam Kurangnya sumber daya yang dapat menyebabkan keadaan rentan di mana kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan tidak terpenuhi (Marcelinus Molo, 1995).

Kemiskinan seringkali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap barang dan jasa yang diperlukan, serta kesulitan mencari pekerjaan atau mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin merupakan salah satu yang menjadi masalah utama di Indonesia karna banyaknya penduduk miskin yang menjadi bahan permasalahan dalam kurangnya kesejahteraan masyarakat kota Batam. Selain banyaknya masyarakat miskin di Indonesia, banyak juga masyarakat pengangguran yang menjadi masalah dalam implementasi kesejahteraan masyarakat. tingkatan pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kota tertinggi ke-3 se-Indonesia dimana pada bulan Februari 2023 dijelaskan juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran dalam seluruh Provinsi termasuk Kota Batam dalam data tersebut Kepulauan Riau meraih angka 8,02 persen bulan Februari 2022 akan tetapi pada Februari 2023 angka pengangguran di kepri menurun menjadi 7.61 persen akan tetapi daerah Kepulauan Riau tetap termasuk angka tertinggi jumlah pengangguran dari Provinsi lain.

Kemiskinan dapat diartikan juga dalam sebuah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Permasalahan kemiskinan tidak terlepas dari strategi nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat negara tersebut secara keseluruhan. Namun selain strategi nasional tersebut, negara dalam

upaya menanggulangi kemiskinan juga mengacu pada kebijakan internasional (Marcelinus Molo, 1995). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia bagaikan setumpuk gunung sampah yang terus bertambah dan harus dibenahi dan dituntaskan. Kemiskinan di Indonesia merupakan kasus utama dari permasalahan sosial yang menjadi studi kasus yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan selalu menjadi perhatian dari pemerintahan Indonesia, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Miskin Kota Batam Tahun Periode 2020-2024



Sumber : Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam

Dilihat dari tabel yang berisikan jumlah penduduk masyarakat miskin Kota Batam periode 2020-2024 memiliki Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Batam pada tahun 2024 mengalami penurunan, setelah sebelumnya mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022, Angka kemiskinan naik pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang berdampak sangat besar pada berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Batam tercatat sebesar 4,85 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2023. Dapat dilihat pada angka kemiskinan Tahun 2020 kenaikan angka kemiskinan melonjak di karenakan adanya masalah covid.

Menurut hukum yang berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Populasi Kependudukan merupakan memperbaiki tata letak dan organisasi. Pengaturan dalam penerbitan Dokumen dan Data Populasi dengan menggunakan sistem Pendaftaran Penduduk, Pendaftaran Perkawinan, dan Administrasi Kependudukan, adalah proses resmi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencatat dan mengelola informasi tentang penduduk suatu negara. Informasi Administrasi adalah kumpulan data terkait dengan tugas dan kegiatan administratif di suatu entitas atau organisasi. Data ini berisi tentang proses bisnis, keputusan manajemen, keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan harian. Informasi Administrasi penting dalam membantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien serta memastikan

kelancaran operasional suatu entitas. Jumlah penduduk dan juga memanfaatkan penggunaan output untuk pelayanan Masyarakat Pengembangan sektor lain.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Per-Kecamatan 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belakang padang	20.870	21.022	20.870	21.130	21.317
Batu ampar	62.460	62.425	62.460	61.894	62.679
Sekupang	152.159	159.126	152.159	170.050	180.779
Nongsa	78.699	84.767	78.699	93.052	99.478
Bulang	11.667	11.952	11.667	12.088	12.426
Lubuk baja	90.589	90.665	90.589	89.838	91.171
Sungai beduk	90.302	92.723	90.302	96.578	101.013
Galang	17.907	18.674	17.907	19.551	20.251
Bengkong	116.671	120.247	116.671	125.093	130.177
Batam kota	184.084	189.034	184.084	195.775	204.577
Sagulung	197.413	204.997	197.413	214.772	225.144
Batu aji	135.061	137.456	135.061	140.971	145.536
Jumlah	1.157.882	1.193.088	1.207.082	1.240.792	1.294.548

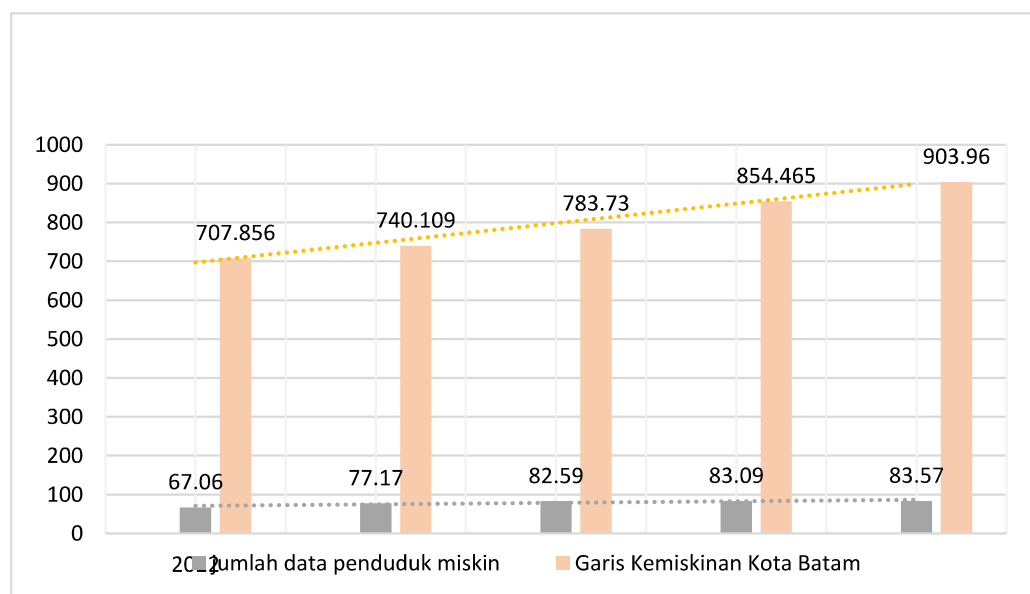
Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam (2025)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kota Batam terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, total penduduk Batam tercatat sebanyak 1.157.882 jiwa. Angka ini terus bertambah setiap tahunnya, hingga mencapai 1.294.548 jiwa pada tahun 2024. Artinya, selama periode lima tahun tersebut, jumlah penduduk meningkat sebanyak 136.666 jiwa, atau rata-rata lebih dari 27 ribu jiwa per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika migrasi dan urbanisasi yang tinggi di Kota Batam sebagai kota industri dan pusat ekonomi regional. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak secara konsisten adalah Sagulung, yang mencatatkan angka sebesar 197.413 jiwa pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 225.144 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadikan Sagulung sebagai wilayah dengan beban kependudukan terbesar di Batam, yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

Kecamatan Batam Kota juga menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dari 184.084 jiwa pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 204.577 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini memperkuat posisi Batam Kota sebagai pusat administrasi sekaligus kawasan hunian padat penduduk. Selain itu, Sekupang dan Batu Aji juga mengalami lonjakan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Sekupang mencatatkan pertumbuhan dari 152.159 jiwa pada tahun 2020 menjadi 180.779 jiwa pada tahun 2024, sedangkan Batu Aji naik dari 135.061 jiwa menjadi 145.536 jiwa pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan-kawasan pinggiran Kota Batam semakin berkembang menjadi area permukiman alternatif.

Di sisi lain, terdapat kecamatan dengan pertumbuhan penduduk yang relatif lambat dan jumlah penduduk yang kecil. Kecamatan Bulang dan Galang, yang merupakan wilayah kepulauan, masing-masing hanya memiliki sekitar 12.426 dan 20.251 jiwa pada tahun 2024. Kondisi geografis yang terpencil dan keterbatasan akses infrastruktur kemungkinan menjadi faktor utama lambatnya pertumbuhan penduduk di kedua kecamatan tersebut. Sementara itu, kecamatan Lubuk Baja dan Batu Ampar, yang dikenal sebagai kawasan pusat bisnis dan perdagangan, menunjukkan angka penduduk yang relatif stabil dan cenderung datar. Lubuk Baja hanya mengalami sedikit kenaikan dari 90.589 jiwa pada tahun 2020 menjadi 91.171 jiwa pada tahun 2024. Begitu pula Batu Ampar, yang mengalami fluktuasi ringan dari 62.460 jiwa menjadi 62.679 jiwa dalam periode yang sama.

Tabel 1.3 Jumlah Data Penduduk Miskin Dan Garis Kemiskinan Kota Batam Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Maret 2024

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa selama periode lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024, Kota Batam mengalami peningkatan baik pada garis kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, 2024 memperlihatkan bahwa angka garis kemiskinan di Kota Batam terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, garis kemiskinan berada di angka Rp707.856 per kapita per bulan. Angka ini meningkat secara konsisten menjadi Rp740.109 pada tahun 2021, Rp783.730 pada tahun 2022, Rp854.465 pada tahun 2023, dan mencapai Rp903.960 pada tahun 2024.

Seiring dengan kenaikan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, jumlahnya tercatat sebanyak 67,06 ribu jiwa. Angka ini melonjak menjadi 77,17 ribu jiwa pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi 82,59 ribu jiwa di tahun 2022. Meskipun kenaikan mulai melambat, tren ini masih berlanjut dengan jumlah penduduk miskin mencapai 83,09 ribu jiwa pada tahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi 83,57 ribu jiwa di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nilai garis kemiskinan yang mencerminkan kebutuhan hidup minimum yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis tersebut juga ikut bertambah. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat belum mampu mengimbangi kenaikan standar hidup, dan upaya pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Batam.

Secara keseluruhan, pola sebaran dan pertumbuhan penduduk Kota Batam menunjukkan adanya konsentrasi kependudukan di kecamatan-kecamatan pusat permukiman dan urbanisasi tinggi, sementara wilayah-wilayah kepulauan dan pusat bisnis cenderung stabil atau tumbuh perlahan. Informasi ini menjadi penting dalam proses perencanaan pembangunan, pemerataan layanan publik, serta pengendalian dampak sosial ekonomi dari pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Maka dengan itu pemerintah menyalurkan bantuan untuk masyarakat Kota Batam yang diselenggarakan oleh dinas sosial untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan layak untuk menerima bantuan tersebut yang disebut dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Di Kota Batam, implementasi PKH telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam validasi data penerima bantuan, di mana masih ditemukan warga yang layak namun tidak terdaftar, serta penerima yang tidak memenuhi kriteria namun tetap mendapatkan bantuan (Nurul Najidah & Dra. Hesti Lestari, 2019). Selain itu, hambatan komunikasi antara pendamping PKH dan masyarakat, terutama akibat perbedaan latar belakang pendidikan, turut mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai program ini. Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan efektivitas PKH melalui berbagai inisiatif, seperti bimbingan teknis bagi pendamping PKH dan penguatan tokoh masyarakat sebagai Bunda PKH untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan program. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran

PKH dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 menjelaskan tentang Upaya percepatan penghapusan kemiskinan dimana pemerintah telah bekerja sama antar kementerian atau Lembaga maupun pemerintahan daerah. Maka dari itu, dalam di perlukan kerja sama inter sektor serta keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi program agar output yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu tugas kementrian sosial adalah untuk Melaksanakan verifikasi dan validasi dalam rangka memutakhirkan data terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerimaan manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 Salah satu bentuk dari penerapan kebijakan tertentu ialah adanya program keluarga harapan. program PKH adalah kebijakan yang dilakukan dalam naungan dinas sosial, salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin di Indonesia. Program Keluarga Harapan ini merupakan program yang mensejahterakan masyarakat miskin di Indonesia. Kebijakan pemerintah berdasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Saya mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat yang Beragumen dengan ketidakadilannya pembagian dalam PKH tersebut di mana keluhan tersebut Jadi perbincangan

terhadap sesama masyarakat di tempat, Mengapa dikatakan tidak adilnya dalam pembagian PKH Dikarenakan banyaknya keluarga yang kurang mampu tetapi tidak mendapatkan PKH tetapi keluarga yang berkecukupan dan layak mencukupi kehidupannya Bahkan mendapatkan pembagian PKH tersebut. Lalu bagaimana pembimbing lapangan dalam pembagian PKH tidak melihat atau tidak mendata masyarakat mana yang seharusnya mendapatkan PKH tersebut? Program Keluarga Harapan (PKH) diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Pendamping merupakan ujung tombak pelaksanaan Program PKH. Kesuksesan pendamping merupakan kesuksesan PKH secara keseluruhan, 4 maka dibutuhkan fasilitas pendukung untuk menunjang kelancaran program PKH ditingkat kecamatan, meliputi Operasional UPPKH tingkat kecamatan(Pendamping).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arif Sofianto pada tahun 2020 (Sofianto, 2020) dengan judul implementasi program keluarga harapan (PKH) Di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Terdapat beberapa kendala yang ditemui, yaitu khususnya tujuan program yang masih belum tepat karena masih terdapat masyarakat tidak miskin yang menerima bantuan dan sebaliknya masyarakat miskin belum menerima bantuan. Hal ini dikarenakan data dari masih belum valid, proses top-down dan pemutakhiran data tingkat desa. menghadapi masalah politik, sosial dan keuangan. Akibatnya, di sejumlah daerah terjadi konflik horizontal di masyarakat. Pemanfaatan bantuan PKH juga belum optimal sesuai ketentuan (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial) dan masih

banyak digunakan untuk kebutuhan konsumen lainnya. PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang paling populer di masyarakat. Bagi penerima PKH, program tersebut sangat membantu kehidupan mereka, namun bagi yang tidak menerima, mereka merasa tujuan program PKH tidak tepat dan tidak adil (Baiq Rizka Milania Ulfah, 2023). Masih banyak masyarakat miskin, termasuk masyarakat yang belum menerima manfaat, namun mereka yang dianggap tidak miskin justru menerima PKH. Mayoritas warga menginginkan PKH tetap dilanjutkan namun dengan perbaikan, termasuk data dan tujuan program agar tidak menimbulkan konflik dan kecurigaan. Dari sudut pandang nominal bantuan, diharapkan akan dikumpulkan dan dicairkan sebulan sekali.

Ada pula kelanjutan dari program keluarga harapan ialah sebuah bantuan langsung tunai atau yang disebut dengan BLT yaitu yang menjadikan dampak kenaikan BBM salah satu dalam program dalam mengatasi strategi penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat miskin dengan bantuan program keluarga harapan PKH yang mengurangi beban pengeluarannya maka dengan meningkatkan sumber daya manusia serta merubah pola pikir dan perilaku yang dapat memutuskan siklus dalam kemiskinan yang memiliki jangka yang sangat panjang . Program Keluarga Harapan memberikan bantuan dalam jumlah yang berbeda berdasarkan kebutuhan rumah tangga. Bantuan PKH ini diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah dan mendapatkan bantuan yang berbeda-beda setiap jenjang sekolahnya.

Tabel 1.4 jumlah Masyarakat kota batam yang menerima bantuan PKH penyaluran BLT di 12 kecamatan Kota Batam 2025

Kecamatan	Jumlah
Belakang padang	2.000 warga
Batam kota	1.508 warga
Nongsa	1.891 warga
Batu aji	1.987 warga
Batu ampar	1.632 warga
bengkong	1.871 warga
Lubuk baja	1.777 warga
sekupang	2.603 warga
sagulung	4.145 warga
Sei beduk	2.165 warga
galang	1.471 warga
bulang	1.404 warga
TOTAL	24.454 warga

Sumber: Dinas Sosial Penyaluran Tahap 1 2025

Dimana dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa buat mewujudkan kehidupan yg layak dan bermartabat, serta buat memenuhi hak atas kebutuhan dasar rakyat negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, serta berkelanjutan. Ada pula undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 yang

menangani fakir miskin dimana dalam artian merupakan upaya yg terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemda, dan /atau rakyat dalam bentuk kebijakan, program dan aktivitas pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi buat memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. contohnya seperti kebutuhan pangan, pakaian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta pelayanan sosial.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis melalui sumber media berita elektronik di mana Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kesalahan penyaluran bahasa pemerintah yang mengakibatkan kerugian di mana ada 6 kesalahan penyaluran Bansos pemerintah yang tidak sesuai ketentuan Sehingga dalam penerima manfaat tidak tepat sasaran yang pertama yaitu BPK menemukan ada penerima mahasiswa tahun lalu yang ternyata sudah meninggal tapi masih masuk data keluarga Dan yang kedua ada penerima Bansos tidak ada di data terpadu dan juga tidak ada di usulan Pemda yang masuk melalui aplikasi sistem kesejahteraan sosial yang ketiga ada pula penerima bantuan yang bermasalah pada tahun 2020 masih ditetapkan sebagai penerima bantuan pada 2021 dan yang keempat penerimaan dengan nomor induk kependudukan invalid atau tidak terdaftar dan yang kelima ada penerima sudah dinonaktifkan tapi masih diberikan dan kesalahan terakhir adalah penerimaan siswa mendapatkan lebih dari sekali atau ganda di mana aduan yang masuk itu sebagai besar terkait peneliti pembantu yang tidak sesuai kriteria masyarakat meminta pemerintah memperbaiki sistem distribusi sehingga Bansos akan diterima oleh orang yang memang benar-benar layak menerima.

Ada pula penulis melihat Berita melalui Kompas.id kaduan masyarakat melalui status aduan Di mana ada masyarakat yang bertanya dalam pembagian Bansos Covid 19 itu Di mana dalam permasalahan tersebut mengeluarkan keluhanya dimana dalam 1 KK ada yang dapat bantuan suami dan istrinya dalam 1 KK bantuan beras 10kg, dapat bantuan BST juga suaminya. Malah ada juga yang dapat BST, PKH, Beras 10kg bulan ini. Malah yang seharusnya dapat sekarang tidak dapat sekali baik PKH, BST & beras 10kg. Kayaknya yang dapat rata-rata dari kalangan RT & RW saja. Tolong diperbaiki sistemnya kalo bisa jangan hanya lewat RT & RW pendataannya karena banyak gak adil nya yang di dahulukan pasti dari kalangan nya kayak saudara & temannya dulu. Jadi percuma mengadu ke RT, RW ataupun ke pihak kelurahan. Katanya 1 KK atau 1 orang hanya bisa mendapatkan 1 jenis BANSOS aja dari PKH, BST atau sembako tapi kenyataan dilapangan berbeda.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik ingin meneliti dengan judul penelitian **“EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN KOTA BATAM”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, yaitu

1. Bagaimana dengan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya mengatasi kemiskinan di Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana dengan keefektifan dan faktor apa saja yang menghambat program keluarga harapan sebagai Upaya mengatasi kemiskinan di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada pemerintah setempat berbagai organisasi yang terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Batam khususnya oleh Dinas Sosial, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH, terutama dalam hal peningkatan prosedur pengumpulan data, bantuan penyaluran, dan pengawasan program dalam jangka panjang untuk memastikan hasil studi ini dapat menjadi cerminan dampak program yang telah tercapai dan mendorong mereka untuk lebih aktif memanfaatkan sumber daya yang tersedia, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup melalui akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, studi ini dapat dipandang sebagai langkah untuk mengevaluasi program-program sosial lain yang sejalan dengan PKH guna mempercepat pembangunan kemiskinan di daerah pedesaan, khususnya di Batam.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebijakan publik dan pembangunan sosial.

Studi ini menyoroti efektivitas program kesejahteraan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam konteks kemiskinan di daerah pedesaan seperti Kota Batam. Selain itu, studi ini dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi dan menerapkan teori implementasi kebijakan publik, seperti teori Van Meter dan Van Horn, pada implementasi program sosial yang sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris yang dapat mendukung atau menantang teori yang ada. Lebih lanjut, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi landasan atau panduan bagi penelitian mendatang yang bertujuan untuk menilai efektivitas program sosial lainnya, baik dalam konteks lokal, nasional, maupun internasional.